

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, dapatlah dikemukakan hal-hal yang merupakan kesimpulan atau rangkuman dari keseluruhan uraian tersebut.

1. Bahwa masalah territorial wilayah laut mendapat perhatian serius pada pemerintahan Kabinet Djuanda. Usaha memperjuangkan batas wilayah laut Indonesia berdasarkan prinsip *archipelago* dilakukan dengan jalan diplomasi yakni: mengadakan rapat dalam rangka membentuk Rancangan Undang-undang Hukum Laut dan territorial Indonesia yang baru untuk menggantikan Ordonansi Hindia Belanda, dan juga mengirim delegasi RI pada konferensi internasional hukum laut PBB yang diselenggarakan pada tanggal 24 Februari sampai 27 April 1958 di Palais Des Nation.
2. Usaha diplomasi delegasi RI pada konferensi hukum laut internasional dalam memperjuangkan batas wilayah laut 12 mil mengalami kegagalan. Hal ini terjadi dikarenakan pada saat dilakukan pemungutan suara, tidak ada satu usul pun yang mendapat kelebihan suara.

5.2 SARAN

Perjuangan para delegasi RI pada konferensi hukum laut internasional PBB pada tahun 1958 di Jenewa memiliki arti yang penting dalam sejarah perjuangan bangsa karena terlihat jelas semangat bangsa Indonesia untuk terus memperjuangkan batas wilayah laut Indonesia sehingga membentuk wilayah kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada generasi penerus untuk terus berusaha memperjuangkan batas wilayah laut Indonesia yang seutuhnya menjadi hak mutlak kita bangsa Indonesia. meskipun di dalam konferensi hukum laut PBB I mengalami kegagalan, namun masih ada kesempatan pada konferensi selanjutnya.
2. Kepada para pecinta sejarah Indonesia hendaknya memahami kembali sejarah Indonesia pada sistem pemerintahan demokrasi liberal khususnya pada masa Kabinet Djuanda untuk memperluas wawasan dan pengetahuan.